

20. RENCANA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan secara langsung oleh Pemerintah Daerah maupun ditempuh dengan cara mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang berjalan simultan dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Proses penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan dimulai dengan persiapan penyusunan Renja dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, adalah sebagai berikut :

- a. Berpedoman pada RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 dan mengacu pada RKPD Tahun 2025.
- b. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
- c. Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung dalam pencapaian Visi dan Misi Daerah.
- d. Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021. Tema Pembangunan Kota Blitar Tahun 2025 adalah “Pemantapan kesejahteraan Masyarakat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi”, dengan penekanan pada peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup guna mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya

mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun juga untuk pemerataan

- e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n+1$; dan

B. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Renja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 19 Seri E Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 3);

23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 17);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
25. Peraturan Walikota Blitar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2025.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2025. Adapun tujuan di susunnya Renja ini adalah :

- a) Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025
- b) Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan tahun 2025
- c) Sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS Tahun 2025 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 disusun dengan mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik, yang terdiri dari :

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dengan dokumen RKPD Tahun 2025, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD Tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025. Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2025 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2025. Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 adalah sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya yaitu tahun 2021, 2022 dan perkiraan capaian tahun 2023. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026. Pada sub bab ini disajikan Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan telaah terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam IKU, IKK, SPM. Pada sub bab ini disajikan table Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah

Berisikan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi pelaksanaan perangkat daerah, serta pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah yang telah diuraikan pada sub bab sebelumnya. Isu – isu penting dapat mengambil dari LKJIP Perangkat Daerah Tahun 2023.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai hasil persandingan antara rancangan awal RKPD dengan program/kegiatan/sub kegiatan hasil identifikasi kebutuhan Perangkat Daerah. Pada sub bab ini disajikan table Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil telaah atas Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah. Pada bab ini juga berisi Tabel Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan rekapitulasi mengenai rencana program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 dengan mencantumkan tagging program/kegiatan/sub kegiatan terhadap SPM/Tematik/Tindaklanjuti LKJIP/Keterangan lain. Pada bab ini juga berisi Tabel Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisi uraian garis besar mengenai rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator, lokasi, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026. Pada bab ini juga berisi Tabel Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Tabel Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026.

BAB V PENUTUP

Berisikan Uraian penutup, berupa :

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II
HASIL EVALUASI RENJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Guna memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Disperindag kota Blitar tahun lalu (2024) dan prakiraan capaian tahun berjalan (2024) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun – tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Adapun program Disperindag Kota Blitar yang dilaksanakan pada tahun 2023 (n-2) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Sedangkan program yang dilaksanakan pada tahun 2024 (n - 1) adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan ;
3. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting ;
4. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen ;
5. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan renja dan pencapaian renstra dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah
Kota Blitar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
3.06	Urusan Perdagangan										
	Bidang urusan aaperdagangan										
	Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	24,7	%	25,11	24,75	25,03	101	24,8	74,94	3,03
	Sasaran Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85,02	indeks	82,8	81	85,01	104,9	85,02	85,01	0,9
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	82	indeks	80	81	84,81	104,70	80,5	83,40	101,71
	Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50	dokumen	10	10	10	100%	10	20	40,00
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40	laporan	8	8	8	100 %	8	16	40,00
	Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100%	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	orang/bulan	58	58	58	100	58	58	96,67
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	20	laporan	4	4	4	100	4	8	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisa- si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasara- n/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan		orang		300	300	100	300	600	
	Sub Keg. Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		paket		5	5	100	5	10	
	Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	55	paket	11	11	11	100	11	22	40

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisa- si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasara- n/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	17	paket	3	3	3	100	3	6	35,29
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	155	paket	6	31	31	100	31	62	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15	paket	15	15	15	100	15	45	3
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	35	paket	5	7	7	100	7	14	40,00
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan	180	dokumen	36	36	36	100	36	72	40,00
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	250	laporan	50	50	50	100	50	100	40,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	20,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	660	rekening	132						
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan		laporan							
	Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100	%	100	100	100	100	100	100	100,00
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	15	unit	3	3	3	100	3	6	40,00
	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	4	unit	4	4	4	100	4	8	200,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	5	unit	1	1	1	100	1	2	40,00
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	75	%	4,75	68	50	72,46	70,5	70,5	94,00
	Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	90	%	70	70	54,54	77,91	70	70	77,78
	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	21	unit	4	4	4	100	4	8	38,10
	Sub Keg. Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7	unit	7	7	7	100	9	23	3,2
	Keg. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	5	%	5	5	5	100	6	16	320

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	4	dokumen		4	4	100	4		
	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	3	dokumen		3	3	100	3	9	3
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100	%		100	100	100	100	100	100,00
	Keg. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat daerah kabupaten/kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	2	%		2	2	100	2	6	3
	Sub Keg. Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2	laporan	2	2	2	100	2	6	3

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100	%	100	100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	10	laporan		2	2	100	2	4	40,00
	Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100	%		100	100	100	100	100	100
	Sub Keg. Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	2	laporan		2	2	100	2	6	3
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	55	%		35	56,2	160,57	40	56,2	102,18

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasara n/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	6.000	unit		5500	4431	80,56	5.700	5700	95,00
	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan ditera ulang	6.000	unit		5500	4431	80,56	5.700	5.700	95,00
	Sub Keg. Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha di Bidang Metrologi Legal yang dibina	1.550	orang		300	940	113	350	1.290	83,23
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	6	%		2	2,07	103,50	2,5	2,07	34,50
	Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan		%		2,5			3,5		
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3	dokumen		3	3	100	4		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/Tujuan/ Sasaran/Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program/Kegi atan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran/Program / Kegiatan/Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2021-2026		Realisasi Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2023			Target Tujuan/ Sasaran/ Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d tahun 2024	
						Target Renja PD tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisa si (%)		Realisasi Capaian Tujuan/Sasara n/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4	dokumen		4	4	100	5	13	
	Sub Keg. Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	6	dokumen		6	6	100	6	12	

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan berhasil, karena berkaitan dengan ekonomi yang sudah mulai membaik dan mulai beranjak naik walaupun masih dalam masa pemulihan karena terdampak oleh adanya pandemi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaannya dimasa mendatang masih perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar

No.	Indikator	SPM/IKK /SPM	Target Renstra SKPD pada Tahun					Realisasi Capaian			Proyeksi capaian pada tahun		Catatan Analisis
			2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Persentase Peningkatan Volume Usaha Perdagangan	IKU	1,75 %	2	2,25	2,5	3	1,85	2,22	2,22	2,24%	2,25 %	Realisasi tahun 2023 diatas target
2	Persentase Peningkatan produktivitas Industri	IKU	0,75 %	1	1,5	2	2,5	0,83	1,072	1,072	1,5%	2 %	
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	IKU	A (80)	A(81)	A(81,5)	A(85)	85,02	A(84)	A(85,01)	A(85,01)	A(85,02)	A(85,02)	Realisasi tahun 2023 diatas target
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/IUTS/SIUP toko swalayan)	IKK	15	15,5	16	16,5	17	5,27	15,5	15,5	16	16,5	
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	IKK	70	70	70	70	70	53,91	70	70	70	70	
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	IKK	35	40	45	50	50	56,27	40	40	45	50	
4	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	IKK	1	1,3	1,5	1,7	1,7	1,45	1,3	1,3	1,5	1,7	
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	IKK	5,50	6	6,50	7	7	100	6	6	6,50	7	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Untuk itu, dalam proses penyusunannya perlu memperhatikan isu-isu tugas dan fungsi yang berkembang, antara lain:

1. Peningkatan Pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana pasar rakyat sesuai standart pelayanan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar
3. Pembinaan dan penataan PKL sesuai Perwali dengan melibatkan OPD terkait (LKJIP)

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah dengan periode 1 tahun, yang memuat daftar Program dan Kegiatan seluruh PD dengan prediksi PAGU Anggaran Indikatif yang bersumber dari APBD maupun APBN. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD, menjadi pedoman penyusunan RENJA SKPD serta menjadi acuan proses Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kota Blitar Tahun 2025 disajikan secara lengkap pada tabel 2.3 Dokumen RENJA ini.

Dari review terhadap rancangan awal RKPD, ada beberapa perubahan pada pagu indikatifnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian pagu yang ada dan skala prioritas kegiatan.

Tabel 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025
KOTA BLITAR

SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN										
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				17.303.444.697					13.026.514.383	Adanya koreksi identifikasi ulang kebutuhan perangkat Daerah Penyesuaian pagu anggaran Pemenuhan anggaran untuk pemenuhan sarpras/gedung perdagangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81.5	7.391.751.595	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81	8.349.936.487	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.734.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100 %	9.411.200	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.003.600	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	10 dokumen	3.050.700	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	8 laporan	6.730.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 dokumen	6.360.500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	5.970.783.010	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100 %	6.310.678.821	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan	57 pegawai	5.965.424.910	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 orang/bulan	6.305.321.021	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/ Semesteran)	12 laporan	5.358.100	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	12 laporan	5.357.800	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat	100 %	154.251.200	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100 %	209.599.200	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			daerah yang sesuai standar								
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	3 paket	91.200.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	4 paket	111.255.200	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	350 orang	63.051.200	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	350 orang	98.344.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Presentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	137.002.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Presentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	228.469.200	
	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	8.000.000	Pengadaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 unit	48.164.200	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	2 unit	55.051.200	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	420.338.600	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100 %	552.281.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	2 Paket	20.197.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	34.991.900	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan	5 paket	54.308.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	84.308.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 paket	7.577.600	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.468.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	17 paket	53.987.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket	80.025.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan	6 paket	35.350.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kota Blitar	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Paket	45.070.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			penggandaan yang disediakan								
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	36 dokumen	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	36 dokumen	6.840.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	20 laporan	243.519.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 laporan	290.577.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	441.253.929	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Presentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan sesuai Standar	100%	643.673.566	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan	205.864.929	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumberdaya Air dan Listrik yang disediakan	24 Laporan	360.549.566	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	235.389.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	24 Laporan	283.024.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	258.388.456	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMN yang terpelihara sesuai standar	100%	395.823.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	13 Unit	150.379.456	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	17 Unit	185.376.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	6 unit	25.509.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	10 unit	25.987.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	1 Unit	75.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	28.020.000	
	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	7.500.000	Pemeliharaan Mebel	Kota Blitar	Jumlah mebel yang dipelihara	2 Unit	34.871.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	137.002.100	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	100 %	228.489.200	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	73.950.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Kota Blitar	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	2 Unit	180.305.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	7.068.446.350	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Kota Blitar	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik	72%	4.694.068.700	
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	6.204.596.600	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Persentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	80 %	3.914.088.800	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 unit	2.631.654.400	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	2 Unit	414.394.800	
	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	2 unit	3.572.942.200	Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	11 Unit	3.499.694.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 Persen	863.849.750	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Kota Blitar	Persentase Usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	6 %	779.979.900	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	446.438.500	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	5 Dokumen	362.568.700	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3 dokumen	417.411.250	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	4 Dokumen	417.411.200	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100 %	194.267.400	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Kota Blitar	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	100%	166.013.400	
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	92.438.600	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	Kota Blitar	Presentase barang penting yang diawasi	100%	82.209.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota					
	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	92.438.600	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 laporan	82.209.800	
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100%	77.728.800	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	100 %	73.903.600	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	77.728.800	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	73.903.600	
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di		persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	24.100.000	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di	Kota Blitar	persentase pedagang pupuk dan pestisida	100 %	9.900.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		bersubsidi yang diawasi			
	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi		Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	24.100.000	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	2 laporan	9.900.000	
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	45%	170.509.038	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Kota Blitar	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	45%	128.971.500	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	170.509.038	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Kota Blitar	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	5.800 unit	128.971.500	
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	74.867.038	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Kota Blitar	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	5500 unit	108.071.400	
	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	200 orang	95.642.000	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Kota Blitar	Jumlah Pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	160 orang	20.900.100	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.478.470.314	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Kota Blitar	Persentase peningkatan IKM	3,5%	2.371.970.314	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif Rp.	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5%	2.478.470.314	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	5%	2.371.970.314	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	69.069.745	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	3 Dokumen	75.569.745	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	6 Dokumen	2.325.526.569	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	5 Dokumen	2.215.526.569	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	4 Dokumen	83.874.000	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	83.874.000	
Jumlah				17.303.444.697					15.710.960.401		

2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Perencanaan pembangunan yang baik tidak boleh bersifat *top down* saja, melainkan harus merupakan paduan yang selaras antara *top down* dan *bottom up*. Sejalan dengan amanat RPJMD Kota Blitar untuk melaksanakan pembangunan yang bersifat partisipatif, maka aspirasi masyarakat yang disalurkan melalui berbagai media harus dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan OPD.

Dalam penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat diuraikan hasil kajian terhadap program / kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan maupun pelaksanaan musrenbang baik tingkat RT / RW, Kelurahan, Kecamatan maupun forum OPD

a. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat RT / RW

Musrenbang tingkat RT / RW merupakan penjangkauan dan penggalian aspirasi masyarakat tingkat bawah (*grass roots*) yang dilaksanakan di tingkat RW. Dalam tahap ini dilakukan inventarisasi dan pembahasan berbagai bentuk usulan masyarakat untuk diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan bukan sekedar keinginan kelompok tertentu. Dengan musrenbang tingkat RT / RW ini diharapkan seluruh aspirasi warga masyarakat benar-benar dapat diakomodasikan dan disalurkan sehingga program-program yang akan direncanakan betul-betul berdasarkan kebutuhan seluruh masyarakat. Diharapkan pada tahap ini telah diperoleh usulan kegiatan pembangunan yang berkualitas yaitu benar-benar merefleksikan kebutuhan masyarakat serta memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

b. Musrenbang Kelurahan

Musrenbang kelurahan adalah forum musyawarah tahunan masyarakat kelurahan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders*) kelurahan untuk menyepakati rencana kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

Musrenbang kelurahan diharapkan menghasilkan formulasi usulan kebutuhan pembangunan yang terpadu yang di dalamnya tidak saja memvalidasi kebutuhan pembangunan hasil musrenbang tahun sebelumnya yang belum tertangani serta mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pembangunan tahun yang akan datang dari masing-masing RT / RW di kelurahan yang bersangkutan, tetapi juga kebutuhan-kebutuhan lintas RW antar dua kelurahan yang berbeda yang diusulkan lebih lanjut ke musrenbang tingkat kecamatan.

c. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah pembangunan tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) di tingkat Kecamatan untuk menentukan prioritas dan memantapkan usulan kegiatan pembangunan masing-masing Kelurahan di Kecamatan yang bersangkutan sekaligus menyepakati rencana kegiatan lintas Kelurahan dan Kecamatan sebagai dasar penyusunan rencana kerja Kecamatan dan Rencana PD Kota pada tahun berikutnya.

Pada musrenbang Kecamatan, usulan dari Kelurahan diklasifikasikan dan didiskusikan sehingga akan didapatkan kegiatan prioritas pada tingkat kecamatan yang harus dilaksanakan pada tahun bersangkutan serta kegiatan lain yang masih bisa ditanggguhkan pelaksanaannya. Formulasi yang sudah terpilih secara rinci kemudian disampaikan secara formal dalam forum SKPD agar terjadi sinkronisasi program / kegiatan dengan SKPD terkait. Pada musrenbang Kecamatan peran SKPD melalui perwakilannya adalah memberikan arahan dan mendetailkan usulan dari hasil Musrenbang Kelurahan dalam rangka memantapkan usulan dari masing-masing Kelurahan.

d. Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forum SKPD)

Forum SKPD (forum yang berhubungan dengan fungsi / sub fungsi, kegiatan / sektor dan lintas sektor) adalah wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang Kecamatan dengan PD sebagai upaya untuk mengisi Rencana Kerja PD yang tata penyelenggaraannya difasilitasi oleh PD terkait, sehingga dalam pelaksanaan forum PD diharuskan menghadirkan perwakilan dari masing-masing Kecamatan dengan membawa hasil Musrenbang Kecamatan.

Namun demikian dalam hal salah satu dokumen tersebut belum tersedia, pelaksanaan forum PD dapat tetap dilakukan. Jumlah forum PD serta jadwal acara pelaksanaannya ditentukan dan dikoordinasikan BAPPEDA, disesuaikan dengan volume kegiatannya dan kondisi setempat. Dalam Forum PD diharapkan terjadi proses sinkronisasi usulan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan dengan program / kegiatan

TABEL 2.4

USULAN PROGRAM & KEGIATAN DARI MASYARAKAT & PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2025 KOTA
BLITAR

SKPD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	VOLUME	CATATAN
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				
1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jl. Bengawan Solo GG V No. 18 Kel. Pakunden Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Paket	
2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jl. Riam Kanan No. 42 RT 03 RW 08 Kel. Bendo Kec. Kepanjenkidul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Paket	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun keempat pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Tema pembangunan RKPD 2025 adalah “Pemantapan kesejahteraan rakyat melalui penguatan ekonomi kreatif, pariwisata dan perdagangan yang berbasis digital menuju kemandirian ekonomi” yang dijabarkan dalam 6 Prioritas, yaitu :

1. Pengurangan angka pengangguran dan kemiskinan
2. Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis digital dan investasi
3. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan SDM yang berdaya saing
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup
5. Penguatan ekonomi kreatif dan peningkatan ekonomi digital
6. Pemantapan Kota Blitar sebagai kota tujuan wisata sejarah yang berwawasan kebangsaan dan kebudayaan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional tahun 2025 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan Pusat dan Daerah yang dituangkan dalam dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah yang memuat rancangan kerangka ekonomi, rencana kerja dan pendanaan, baik dilaksanakan secara langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi OPD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu.

Adapun penetapan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar di tahun 2025 sebagaimana dalam *Tabel 3.1* di bawah ini.

Tabel 3.1

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Definisi Operasional	Tahun 2023		Perkiraan Realisasi Tahun 2024	Target	
				Target	Realisasi		2025	2026
	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Laju pertumbuhan ekonomi ini merupakan ukuran turunan dari PDRB. Adapun PDRB merupakan agregat atau total nilai tambah yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi di wilayah tersebut dalam satu kurun waktu tertentu. Besaran PDRB mencerminkan potensi ekonomi suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya	24,75	25,03	25,03	25,035	29
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		10,01	9,85	10,01	10,11	10,12
	Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	Volume Usaha Perdagangan adalah total nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa pada suatu periode tahun buku yang bersangkutan dan nantinya akan mendatangkan suatu pendapatan	2	2,22	2,25	2,5	3
	Sasaran 2 : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	Produktivitas adalah produksi dari sejumlah komoditi dan jasa yang benar-benar dihasilkan dari proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan industri itu sendiri dalam kurun waktu tertentu	1	1,072	1,5	2,5	7,75
	Sasaran 3 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBD Nilai A pada range >80-90	A (81)	A (85,01)	A (86,04)	A (86,04)	A (86,04)

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

3.3 Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perindustrian dan Perdagangan di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

3.4 Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari perubahan renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri

Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

3.5 Program dan Kegiatan

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 adalah 5 Program, 14 Kegiatan dan 35 sub kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6 Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	24,9	
						Sasaran : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\frac{[(\text{Volume Usaha Perdagangan tahun } n - \text{Volume Usaha Perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Volume Usaha Perdagangan tahun } (n-1)]}{x 100 \%}$	%	2,5	
3	30	03				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	%	73,5	32.716.886.000
3	30	03	2	01		Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	{Jumlah bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik/ Jumlah bangunan pasar rakyat yang ada} x 100 %	%	80	31.625.000.000
3	30	03	2	01	01	Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi Perdagangan pada tahun n	unit	8	15.812.500.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	03	2	01	02	Sub Keg.Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan pada tahun n	unit	9	15.812.500.000
3	30	03	2	02		Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	(Jumlah usaha perdgangan yang dibina / jumlah usaha perdagangan) x 100%	%	6	1.091.886.000
3	30	03	2	02	01	Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan	Jumlah hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000
3	30	03	2	02	02	Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan kepada pengelola sarana distribusi perdagangan pada tahun n	dokumen	4	545.943.000
3	30	04				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	(Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan / Jumlah hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang ada) x 100%	%	100	291.500.000
3	30	04	2	01		Keg.Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat daerah Kab/Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	(Jumlah barang penting yang diawasi / jumlah barang penting yang harus diawasi) x 100%	%	100	90.500.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	04	2	01	01	Sub.Keg Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat pada tahun n	laporan	2	90.500.000
3	30	04	2	02		Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase pengendalian harga dan stok barang yang diawasi	(jumlah harga dan stok barang yang diawasi / jumlah harga dan stok barang yang harus diawasi) x 100%	%	100	110.500.000
3	30	04	2	02	01	Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah hasil dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota pada tahun n	laporan	3	110.500.000
3	30	04	2	03		Keg. Pengawasan Pupuk dan Pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota	Persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	(Jumlah pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi / jumlah pedagang pupuk dan pestisida yang ada) x 100%	%	100	90.500.000
3	30	04	2	03	02	Sub.Keg. Pengawasan pengadaan Pupuk dan Pestisida bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	Jumlah hasil pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi	laporan	2	90.500.000
3	30	06				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	%	50	709.696.500

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	30	06	2	01		Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun n	unit	6000	709.696.500
3	30	06	2	01	01	Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera ulang pada tahun n	unit	5900	291.977.000
3	30	06	2	01	02	Sub Keg. Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina	Jumlah pelaku usaha dibidang metrology legal yang dibina pada tahun n	orang	300	417.719.500
						Tujuan : MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Kontribusi sector perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,91	
						Sasaran : Meningkatkan produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas Industri	$\frac{[(\text{Produktivitas industri tahun } n - \text{Produktivitas industri tahun } (n-1))]}{[\text{produktivitas industry tahun } (n-1)]} \times 100\%$	%	2	
3	31	02				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	$\frac{\{(\text{Jumlah IKM tahun } n - \text{Jumlah IKM tahun } (n-1))/\text{Jumlah IKM tahun } (n-1)\}}{100 \%}$	%	5	2.430.225.000
3	31	02	2	01		Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Persentase IKM yang memperoleh pembinaan	$\frac{(\text{Jumlah IKM yang dibina} / \text{Jumlah IKM})}{x 100\%}$	%	5	2.430.225.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
3	31	02	2	01	02	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri pada tahun n	dokumen	4	500.850.000
3	31	02	2	01	05	Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat pada tahun n	dokumen	5	1.600.375.000
						Sub.Keg.Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industry pada tahun n	dokumen	5	329.000.000
						Tujuan : Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah Sasaran : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Kategori Sakip Perangkat Daerah	Nilai	A (82)	
1	06	01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun n	%	81,5	9.108.329.988
1	06	01	2	01		Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	(Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun tepat waktu dan sesuai standar tahun n / jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang harus disusun tahun n) x 100 %	%	100	18.973.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	01	01	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun tahun n	dokumen	10	10.628.000
1	06	01	2	01	06	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD pada tahun n	laporan	8	8.345.000
1	06	01	2	02		Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi keuangan perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	7.593.520.388
1	06	01	2	02	01	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN pada Tahun berjalan	orang	60	7.586.617.888
1	06	01	2	02	02	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan /triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD pada tahun berjalan	laporan	4	6.502.500
1	06	01	2	05		Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Jumlah pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standar tahun n /jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah yang harus dilayani tahun n) x 100 %	%	100	231.525.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	05	02	Sub keg Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan pada tahun berjalan	paket	5	98.500.000
1	06	01	2	05	10	Sub keg Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yg mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan pada tahun berjalan	orang	300	133.025.000
1	06	01	2	06		Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	(Jumlah ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar tahun n / jumlah administrasi umum perangkat daerah yang harus disediakan tahun n) x 100 %	%	100	436.733.600
1	06	01	2	06	01	Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	11	12.850.000
1	06	01	2	06	02	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	4	76.476.750
1	06	01	2	06	03	Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan pada tahun berjalan	paket	7	51.773.400
1	06	01	2	06	04	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan pada tahun berjalan	paket	15	115.015.000
1	06	01	2	06	05	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan	Jumlah paket barang cetakan yang disediakan pada tahun berjalan	paket	6	44.100.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	06	06	Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah bahan bacaan dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan pada tahun berjalan	dokumen	36	8.612.700
1	06	01	2	06	09	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	15	127.905.750
1	06	01	2	07		Keg. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	(Jumlah BMD yang tersedia sesuai standart/Jumlah BMD yang harus disediakan)x 100%	%	100	300.900.000
1	06	01	2	07	11	Sub Keg. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	1	300.900.000
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	80.000.000
						Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan pada tahun berjalan	unit	2	8.000.000
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan pada tahun berjalan	Unit	2	30.000.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	08		Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	(Jumlah penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia sesuai standart / Jumlah penunjang urusan pemerintahan yang harus disediakan) x 100%	%	100	401.600.000
1	06	01	2	08	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan pada tahun berjalan	laporan	48	201.600.000
1	06	01	2	08	04	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan pada tahun berjalan	laporan	24	200.000.000
1	06	01	2	09		Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	(Jumlah BMD yang terpelihara sesuai standar tahun n / jumlah BMD yang harus dipelihara tahun n) x 100 %	%	100	125.078.000
1	06	01	2	09	02	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannyaterpelihara pada tahun berjalan	unit	13	33.424.000
2	23	01	2	09	00 05	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara pada tahun berjalan	Unit	2	7.500.000
1	06	01	2	09	06	Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara pada tahun berjalan	unit	4	18.000.000

KODE						URUSAN BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM, KEGIATAN /DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN	Target dan Anggaran	
										2025	
										K	Rp
1						2	3	4	5	6	7
1	06	01	2	09	09	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi pada tahun berjalan	unit	1	46.420.000
1	06	01	2	09	11	Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang dipelihara/direhabilitasi pada tahun berjalan	unit	5	27.234.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan tahun 2025 dan pagu indikatif tahun 2025 secara keseluruhan. Perumusan program dan kegiatan tersebut didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021- 2026, evaluasi capaian kinerja, permasalahan, isu strategis, aspirasi masyarakat serta pokok-pokok pikiran DPRD.

Untuk mendukung pencapaian sasaran, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2025. Program dan kegiatan prioritas tersebut diharapkan dapat memicu tercapainya target kinerja utaman Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2025 serta mendukung terwujudnya target capaian nasional, provinsi dan Daerah.

Tabel. 4.1.

Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan pembangunan pasar ayam.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan
2	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan menata PKL dengan lebih baik lagi sesuai dengan perwali yang ada dan tetap berkoordinasi dengan OPD tang terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan
3	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
	membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM		
4	Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK	Melaksanakan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan OPD terkait	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
5	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
6	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat -

4.2 Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif Tahun 2025

Rencana kerja dan pendanaan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan baik prioritas perangkat daerah maupun operasional yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangannya. Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah tahun 2025 adalah sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2025
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2026 KOTA BLITAR

Nama PD : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3.	.			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								
3	30			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				15.710.960.401				20.532.057.700
3	30	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Kota Blitar	81	8.429.936.487			84	8.485.790.951
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	9.411.200	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	3.325.051
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah	Kota Blitar	10 dokumen	3.050.700	Dana Transfer Umum-DAU		10 dokumen	3.325.051
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	Kota Blitar	8 dokumen	6.360.500	Dana Transfer Umum-DAU		8 dokumen	7.448.820

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	6.390.678.821	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	6.393.542.924
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	57 orang	6.385.321.021	Dana Transfer Umum-DAU	57 pegawai	6.367.634.364
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKP	Kota Blitar	12 laporan	5.357.800	Dana Transfer Umum-DAU	12 laporan	5.908.560
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	Kota Blitar	100 %	209.599.200	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	195.078.000
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Kota Blitar	4 paket	111.255.200		4 paket	95.325.000

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
						LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan PerundangUndangan	Kota Blitar	350 orang	98.344.000	DBHCHT		350 orang	99.753.000
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	Kota Blitar	100 %	552.281.000	Dana Transfer Umum-DAU		100 %	545.266.000
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kota Blitar	1 Paket	34.991.900	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	35.145.000
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	4 paket	84.308.000	Dana Transfer Umum-DAU		4 paket	74.500.000
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Blitar	1 Paket	10.468.800	Dana Transfer Umum-DAU		1 paket	11.644.000
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	15 Paket	80.025.000	Dana Transfer Umum-DAU		15 paket	83.987.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Blitar	4 Paket	45.070.000	Dana Transfer Umum-DAU	4 paket	48.350.000
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Kota Blitar	36 dokumen	6.840.000	Dana Transfer Umum-DAU	36 dokumen	7.840.000
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	15 laporan	290.577.500	Dana Transfer Umum-DAU	15 laporan	283.800.000
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	Kota Blitar	100 %	643.673.566	Dana Transfer Umum-DAU	100 %	674.455.000
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	360.649.566	Dana Transfer Umum-DAU	24 laporan	380.405.000
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Blitar	24 laporan	283.024.000		24 laporan	294.050.000
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	Kota Blitar	100 %	395.823.500	Dana Transfer	100 %	431.075.156

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Umum- DAU			
				Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Kota Blitar	2 unit	28.020.000		2 unit	45.000.000
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Blitar	17 unit	185.376.500	Dana Transfer Umum- DAU	17 unit	186.379.456
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Blitar	10 unit	25.987.000	Dana Transfer Umum- DAU	10 unit	36.195.700
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitas	Kota Blitar	1 unit	121.569.000	Dana Transfer Umum- DAU	1 unit	125.000.000
				Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Kota Blitar	2 unit	34.871.000			38.500.000
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang tersedia sesuai standar	Kota Blitar	100 %	228.469.200			311.100.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Kota Blitar	2 unit	48.164.200		2 unit	50.000.000
				Pengadaan kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Kota Blitar				2 unit	75.500.000
				Pengadaan Pealatan dan Mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kota Blitar	2 unit	180.305.000			185.600.000
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	Kota Blitar	72%	4.694.068.700	Dana Transfer Umum-DAU	%	7.221.976.604
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	Kota Blitar	80 %	3.914.088.800	Dana Transfer Umum-DAU	%	5.891.716.604
				Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	2 unit	414.394.800	Dana Transfer Umum-DAU	2 unit	2.256.000.000
				Fasilitasi Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah fasilitasi pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Kota Blitar	11 unit	3.499.694.000		11 unit	3.635.716.604

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	6 %	779.979.900	Dana Transfer Umum- DAU	%	1.330.260.000
				Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	5 Dokumen	362.568.700	Dana Transfer Umum- DAU	5 dokumen	950.260.000
				Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Kota Blitar	4 Dokumen	417.411.200	Dana Transfer Umum- DAU	4 dokumen	380.000.000
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	Kota Blitar	100 %	166.013.400	Dana Transfer Umum- DAU	100 %	253.386.749
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketersediaan barang penting yang diawasi	Kota Blitar	100%	82.209.800		100%	112.446.749
				Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Kota Blitar	2 laporan	82.209.800		2 laporan	112.446.749
				Pengendalian Harga, dan Stok	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	Kota Blitar	100%	73.903.600	Dana Transfer	100 %	98.738.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota				Umum-DAU			
				Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Kota Blitar	4 laporan	73.903.600	Dana Transfer Umum-DAU	4 laporan	98.738.000
				Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	Kota Blitar	100 %	9.900.000		100 %	42.200.000
				Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Kota Blitar	2 laporan	9.900.000		2 laporan	42.200.000
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTPP bertanda tera sah	Kota Blitar	45 %	128.971.500	Dana Transfer Umum-DAU	%	224.820.000
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTPP yang bertanda tera sah	Kota Blitar	5.800 Unit	108.071.400	Dana Transfer	5.500 Unit	224.820.000

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
										Umum-DAU			
					Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kota Blitar	5500 unit	20.900.100	Dana Transfer Umum-DAU		5500 unit	89.000.000
					Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kota Blitar	160 orang	95.642.900	Dana Transfer Umum-DAU		160 orang	135.820.000
					URUSAN PERINDUSTRIAN				2.371.970.314				4.030.352.000
					PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase peningkatan IKM	Kota Blitar	3,5 %	2.371.970.314	Dana Transfer Umum-DAU		%	4.030.352.000
					Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	persentase IKM yang memperoleh pembinaan	Kota Blitar	5 %	2.371.970.314	Dana Transfer Umum-DAU		%	4.030.352.000
					Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Kota Blitar	3 Dokumen	72.569.745	Dana Transfer Umum-DAU		3dokumen	218.652.000

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN			INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2025				CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026	
					LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
(1)	(2)			(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kota Blitar	5 dokumen	2.215.526.569	Dana Transfer Umum- DAU	5 dokumen	3.654.500.000
				Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Kota Blitar	3 dokumen	83.874.000		3 dokumen	157.200.000
TOTAL							15.790.960.401				19.652.122.148

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2025 juga memfokuskan pada rencana tindak lanjut atas Langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKjIP Tahun 2024, sebagai berikut:

- a. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi.
- b. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- c. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM
- d. Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK
- e. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI
- f. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 yang berpedoman pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun (2021-2026) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2025. Rencana Kerja ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2023 dan 2024, sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan di dalam melaksanakan program dan kegiatan satu tahun kedepan, memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1. Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - a. Rumusan program/ kegiatan di dalam RENJA Dinas Perindustrian dan Perdagangan didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/ pilihan pemerintah daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
 - b. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun 2024 dan tahun 2025.
 - c. Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD
2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
 - a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2025;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2025 ;
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.
 - d. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2025 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

3. Rencana Tindak Lanjut

Dalam menjalani tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar memerlukan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

- a. Dalam rangka sinergitas perencanaan untuk mewujudkan Indikator Kinerja Utama yang berkaitan dengan peningkatan kualitas perencanaan dan pengukuran kinerja, koordinasi dengan perangkat daerah harus dilaksanakan lebih intensif, agar proses pembangunan yang dilaksanakan berdaya guna dan berhasil guna.
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, dalam proses perencanaan, sehingga transparansi akan lebih terwujud.
- c. Peningkatan kapasitas SDM aparatur dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal, bimtek, pelatihan, seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja aparatur perencanaan
- d. Dengan ditetapkan Renja Tahun 2025, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan beedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Akhirnya, sajian dokumen ini diharapkan dapat bermanfaat kepada siapapun juga atau setidaknya dapat mengetahui kedudukan tugas dan fungsi serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Memperhatikan percepatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dan mengingat rencana kerja dilakukan dengan kurun waktu satu tahun anggaran maka untuk mencapai tujuan sesuai dengan target masing-masing kegiatan perlu mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi internal dan eksternal di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.